



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

NOTULEN RAPAT

Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

*Topik: Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan
Indonesia*

1. Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Jumat, 7 September 2018

Waktu : 09.00-11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat DH-4

2. Pimpinan Rapat : Kepala Subdirektorat Kualitas Pelayanan
Publik, Kementerian PPN/Bappenas

3. Peserta Rapat :

1. Kantor Staf Presiden
2. Medialink
3. Kopel
4. Sekretariat Open Government Indonesia

4. Pembahasan Rapat

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L
3. Tujuan dari Renaksi ini adalah ingin mendorong tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia.

4. Sebelumnya sudah ada Renaksi OGI 2016/2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka. Renaksi tersebut telah menghasilkan Rancangan Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka. Namun, rancangan tersebut dinilai perlu untuk disempurnakan kembali. Sehingga, akan menjadi salah satu fokus pada Renaksi Tata Kelola OGI untuk Tahun 2018-2020.
5. Penyempurnaan pembuatan Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka sangat penting, dan harus disertai *deep study* yang relevan terkait OGI dari segala aspek secara holistik, baik dari segi kelembagaan, kerangka regulasi, dan pendanaan.
6. Salah satu tantangan utama dalam proses ko-kreasi keterbukaan pemerintah adalah keterlibatan CSO dalam proses implementasi renaksi sangat minim. CSO hanya dilibatkan pada awal dan akhir proses rencana aksi saja.
7. Penguatan penyelenggaraan *Open Government* pada awalnya diusulkan melalui pembuatan Perpres, namun setelah dikaji kembali sebenarnya perlu dilihat urgensi Perpres ini apa. Apakah ada hal-hal tertentu yang sangat mendesak untuk diatur melalui perpres? Apakah penguatan OGI harus selalu melalui regulasi tertentu? Karena saat ini kebijakan pemerintah mendorong deregulasi, justru sedang mengurangi banyak regulasi yang kurang mendesak, dan di sisi lain untuk membentuk regulasi baru harus memiliki kajian akademis yang sangat mendalam. Banyak hal lain yang lebih penting yang harus didefinisikan terlebih dahulu, seperti terkait *Positioning* OGI dan *Sustainability* OGI
8. Sebelum membahas terkait dengan proses kelembagaan, perlu didefinisikan secara khusus terkait pendefinisian fokus isu *Open Government*, karena selama ini *Open Government* memiliki fokus yang cukup luas dan bersifat multisektoral. Sehingga, perlu didefinisikan apa fokus khusus dari *Open Government* apakah akan fokus pada keterbukaan informasi, pelayanan publik, atau anti korupsi agar

nantinya OGI bisa lebih terfokus dan bisa berjalan secara berkelanjutan.

9. Pembahasan *Positioning* dan pendefinisian OGI:
 - a. Menurut Medialink OGI penting karena sebagai salah satu negara pendiri *Open Government Partnership*, metode ko-kreasi hanya ada di OGI, meningkatkan pelayanan publik, dan memiliki peluang untuk menjadi wadah kolaborasi multisektoral.
 - b. Menurut Pulse Lab dan KSP, OGI selama ini dapat berperan sebagai lab inovasi yang berfungsi sebagai *Think Tank* pemerintah untuk membuat inovasi pelayanan publik yang baru. Selain itu dalam proses pembahasan yang melibatkan CSO akan memperkuat inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Menurut OGI, dapat difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat.
10. Selama ini, banyak inisiatif-inisiatif keterbukaan yang berjalan sendiri-sendiri. Jika ditinjau dari kerangka kebijakan, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah banyak menerbitkan peraturan terkait inisiatif pemerintahan yang terbuka. Bahkan pada tataran implementasi berbagai produk keterbukaan juga telah dihasilkan.
11. Respon terhadap indikator capaian yang diusulkan dalam Renaksi OGI 2018-2020:
 - a. Terselenggaranya konsultasi publik terkait draft Peraturan Presiden tentang Open Government Indonesia (dihilangkan karena terlalu ambisius, dan urgensi perpres perlu dikaji kembali).
 - b. Tersosialisasikannya Peta Jalan keterbukaan pemerintah Indonesia (dipertahankan, karena penting).
 - c. Teralokasinya dukungan pendanaan untuk pemerintah daerah dan CSO untuk memperkuat open government. Terpublikasinya SK terkait pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah indonesia 2018-2020. Poin-poin terkait dengan strategi, pendanaan, visi dan isu kebijakan akan dituangkan dalam roadmap OGI.

- d. Indeks keterbukaan pemerintahan Indonesia terpublikasi kepada masyarakat luas. indeks keterbukaan apakah sudah ada barangnya? Karena banyak yang mengeluarkan indeks. Perlu diperjelas dulu fokus OGI di bidang apa baru memfokuskan indeks keterbukaannya.
12. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pembentukan dan finalisasi roadmap OGI termasuk didalamnya poin-poin kebutuhan kerangka regulasi. Sebagai tambahan, OGI perlu melaksanakan implementasi rencana kerja tim koordinasi OGI (pertemuan dewan pengarah, donor meeting, dll)

Notulis Rapat

Putu Lumina Mentari

Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Penguatan tata kelola penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia

Latar Belakang : Keterbukaan pemerintah Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2012. Semenjak berjalannya kegiatan OGI, organisasi masyarakat sipil menilai tata kelola OGI perlu dikuatkan. Aspek penguatan tersebut terdiri dari desain kelembagaan, pendanaan, perencanaan strategis yang terangkum dalam peta jalan (roadmap) serta penguatan komitmen renaksi dalam kerangka regulasi ataupun kebijakan strategis lainnya.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Penguatan tata kelola penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia	Tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia	1. Penyempurnaan roadmap (termasuk kerangka regulasi, termasuk tersosialisasikannya peta jalan OGI, dan Indeks keterbukaan pemerintahan) 2. Implementasi rencana kerja Tim Koordinasi Kerja OGI (pertemuan dewan pengarah, donor meeting, termasuk terimplementasikannya Renaksi 2018-2020, dll)	Bappenas	Kantor Staf Presiden Kementerian Luar Negeri Kementerian Keuangan

